

PERAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SOSIAL DI INDONESIA: SOLUSI TERHADAP KORUPSI, KETIDAKADILAN, DAN KEMISKINAN

Gassanov Teymur, Ario Pamungkas, Muhammad Farrel Aubin, Daaryl Putra Pratama, Ali, Dani Ramadhan, Muhammad Afif Azzamka

FIKOM Universitas Esa Unggul

Email : afifazzamka01@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Kasus korupsi bukanlah persoalan baru bagi suatu bangsa. Masyarakat Indonesia sangat prihatin dengan permasalahan yang sudah berlangsung puluhan tahun ini. Persoalan korupsi yang kian melumpuhkan masih menjadi upaya pemberantasan masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan untuk memerangi permasalahan Indonesia saat ini, khususnya korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan cita-cita Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Isu

Abstract

Cases of corruption are not a recent issue for a nation. This problem has persisted for many years and is a major worry for the people of Indonesia. The Indonesian people continue to work toward resolving the increasingly concerning issue of corruption. The purpose of this study is to ascertain how much Pancasila ideals impact Indonesia's attempts to address current issues, especially corruption. The study uses a qualitative methodology. The findings suggest that incorporating Pancasila ideals into daily life might aid in resolving Indonesia's corruption problems.

Keywords: Pancasila, Corruption, Issues

PENDAHULUAN

Tiga permasalahan sosial yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia— korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan— merupakan hambatan utama bagi kemajuan

negara ini. Selain merugikan keuangan pemerintah, korupsi juga mengikis status sosio-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat termiskin, dengan membatasi kewenangan untuk kepentingan pribadi

(Liandy et al., 2022). Munculnya kasus korupsi yang terus berlanjut menunjukkan bahwa perilaku ini berdampak baik pada individu maupun sistem yang lebih luas, sehingga menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Pamungkas et al., 2022). Oleh karena itu, Pancasila, ideologi politik Indonesia, dapat berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diperlukan untuk mengakhiri korupsi (Alfarizi et al., 2022). Tujuannya, dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat dan organisasi mampu berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan menumbuhkan suasana yang lebih transparan (Kurniawan et al., 2022).

Di Indonesia, ketidakadilan sosial sering kali disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang lebih luas. Akibat kebijakan pemerintah yang kurang baik, banyak masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan (Jilan et al., 2022). Pancasila menyoroti pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bagian ini, dengan alasan bahwa pengurangan ketidakadilan ini dapat dicapai melalui implementasi kebijakan publik (Amanda et al., 2022). Diharapkan dengan melestarikan cita-cita Pancasila, pemerintah akan mampu mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif serta memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan penting (Liandy et al., 2023).

Di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan penting yang harus diatasi. Berbagai inisiatif telah dimulai untuk mengatasi masalah ini, namun hasilnya sering kali mengecewakan (Kurniawan dkk., 2023). Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan kerangka untuk menciptakan rencana yang lebih ampuh dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor korporasi dapat bekerja sama untuk memberikan solusi berkelanjutan karena

cita-cita dan kesatuan kemanusiaan Pancasila (Alfarizi et al., 2023). Diperkirakan bahwa dengan menggunakan strategi yang komprehensif, pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan secara lebih metodis dan strategis (Pamungkas et al., 2023).

Hal ini bukan sekedar pilihan, namun juga menjadi keharusan bagi Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi. Indonesia diyakini mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun masyarakat sejahtera dan berkeadilan dengan mengintegrasikan cita-cita Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Liandy et al., 2023). Bangsa Indonesia dapat maju menuju masa depan yang lebih cerah dimana seluruh warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan negara dengan memutuskan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Pemahaman dan penegakan cita-cita Pancasila menjadi semakin penting dalam menghadapi permasalahan yang semakin rumit akibat globalisasi, karena membantu menjaga keutuhan negara dan memperkuat moral generasi muda Indonesia. Ada kelebihan dan kekurangan globalisasi. Meskipun teknologi dan informasi kontemporer semakin mudah diperoleh, budaya asing sering kali mengancam identitas budaya lokal melalui berbagai saluran komunikasi (Jilan et al., 2022). Sebagai langkah strategis dalam menumbuhkembangkan rasa jati diri bangsa yang kuat, penting bagi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk berkolaborasi mendorong penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan ikhtiar ini adalah pendidikan yang berbasis Pancasila. Generasi muda dapat dididik untuk memahami dan menghormati jati diri bangsa melalui

pendidikan yang mengedepankan cita-cita Pancasila. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk moral dan karakter serta penyampaian informasi (Kurniawan et al., 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat penggabungan cita-cita Pancasila ke dalam kurikulum untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memiliki kecerdasan akademis tetapi juga integritas dan rasa tanggung jawab sosial.

Selain itu, kesulitan yang ditimbulkan oleh globalisasi memerlukan perubahan adaptasi. Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan laju globalisasi yang cepat tanpa kehilangan rasa identitas budayanya. Dengan menawarkan kerangka moral yang berbeda yang membantu masyarakat membuat pilihan di antara banyak pilihan yang tersedia, Pancasila dapat bertindak sebagai panduan dalam proses ini (Amanda et al., 2023).

Budaya dan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan karakter berlangsung di masyarakat dan keluarga serta di sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suasana yang mendorong penerapan cita-cita Pancasila, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangatlah penting (Liandy et al., 2023).

Analisis pengaruh Pancasila terhadap karakter bangsa Indonesia di era globalisasi menjadi tujuan penelitian ini. Penerapan masing-masing sila Pancasila dalam permasalahan dunia kontemporer akan diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis literatur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai nilai Pancasila sebagai kompas moral dalam menghadapi globalisasi dan memberikan masukan bagi pendidikan karakter berbasis Pancasila di Indonesia.

Selain menjadi referensi bagi para akademisi dan praktisi di bidang pendidikan, kewarganegaraan, dan agama,

penulis yakin karya ini akan semakin memperbincangkan pentingnya Pancasila dalam penciptaan karakter bangsa. Pemahaman dan penegakan cita-cita Pancasila menjadi semakin penting dalam menghadapi permasalahan yang semakin rumit akibat globalisasi, karena membantu menjaga keutuhan negara dan memperkuat moral generasi muda Indonesia.

Sebagai langkah strategis dalam menumbuhkembangkan rasa jati diri bangsa yang kuat dalam menghadapi globalisasi, penting bagi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk berkolaborasi mendorong penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain menganalisis fungsi Pancasila, kajian ini mengajak setiap orang untuk berpartisipasi aktif mewujudkan cita-cita negara dengan mengamalkan prinsip-prinsip luhurnya.

PEMBAHASAN

Menggunakan cita-cita Pancasila sebagai landasan untuk memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi di Indonesia adalah sebuah pilihan dan kewajiban. Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan mengintegrasikan cita-cita tersebut ke dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia dapat maju menuju masa depan yang lebih cerah dengan berkomitmen untuk mengamalkan cita-cita Pancasila.

Prinsip-prinsip Pancasila menjadi sangat relevan ketika menangani permasalahan kemasyarakatan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan korupsi. Misalnya, agar generasi muda memahami teori dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, penerapan kualitas pendidikan berbasis Pancasila di sekolah perlu ditingkatkan (Devina et al., 2023). Agar

anak-anak dapat mempelajari nilai kejujuran dan integritas sejak usia dini, pendidikan antikorupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum resmi. Hal ini penting karena pendidikan yang baik dapat membentuk karakter moral yang kuat dan menentukan perilaku korupsi di masa depan.

Selain itu, pemerintah harus membantu lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pendanaan yang memadai dan pelatihan etika publik bagi anggota stafnya (Pamungkas et al., 2023). Hal ini penting agar organisasi dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memungkinkan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan korupsi secara menyeluruh. Selain itu, keterbukaan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran publik diperlukan untuk mengurangi kemungkinan praktik penipuan.

Tindakan publik yang membantu masyarakat miskin juga harus menanggapi ketidakadilan sosial dengan serius (Kurniawan et al., 2023). Program afirmatif, seperti beasiswa bagi siswa luar biasa dari keluarga kurang mampu, harus didanai untuk menciptakan kesetaraan kesempatan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak aspek dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah harus menerapkan reformasi struktural untuk memastikan sumber daya didistribusikan secara lebih adil. Misalnya, memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memungkinkan mereka meningkatkan taraf hidup mereka. (Alfarizi et al., 2023).

Untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, kerjasama antara sektor publik dan korporasi serta kelompok non-pemerintah sangatlah penting. Salah satu cara untuk memberikan akses kepada masyarakat kecil terhadap pembiayaan usaha dan membantu

mereka menjadi mandiri secara ekonomi adalah melalui program keuangan mikro. Pemberdayaan masyarakat untuk menghasilkan lapangan kerja baru dapat dilakukan dengan memberi mereka akses terhadap keuangan dan pelatihan keterampilan.

Oleh karena itu, mengamalkan cita-cita Pancasila bukan sekedar slogan; hal ini membutuhkan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat. Setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa terkendala oleh perilaku tidak etis atau ketidakadilan sosial berkat komitmen kita bersama. Untuk mewujudkan lingkungan sosial yang lebih adil dan sejahtera, cita-cita Pancasila dapat berhasil diimplementasikan melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Nilai Pendidikan Berdasarkan Pancasila

Pembangunan karakter bangsa harus mengedepankan pendidikan berbasis Pancasila (Jilan et al., 2023). Generasi muda mempelajari pentingnya prinsip-prinsip moral seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan menghormati orang lain melalui pendidikan ini. Kurikulum harus dibuat agar siswa dapat mempelajari sejarah Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini melibatkan pemberian instruksi kepada siswa tentang bagaimana menerapkan masing-masing prinsip Pancasila dalam konteks kontemporer.

Selain itu, pendidikan berbasis Pancasila harus memperhatikan pengembangan keterampilan bagi generasi penerus (Amanda et al., 2023). Siswa akan lebih siap untuk menangani tuntutan di tempat kerja dan menyadari nilai kontribusi mereka kepada masyarakat jika mereka diberikan keterampilan praktis melalui program pelatihan kejuruan atau pelatihan ketenagakerjaan lainnya. Sejalan dengan cita-cita Pancasila, pendidikan keterampilan ini menumbuhkan

pengembangan karakter selain kemampuan teknis.

Selain itu, dukungan orang tua terhadap sekolah berbasis Pancasila sangatlah penting (Liandy et al., 2022). Orang tua harus memberi contoh kepada anak-anak mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan mempelajari konteks cita-cita moral dan signifikansinya bagi kehidupan mereka melalui dialog terbuka tentang keprihatinan sosial dan prinsip-prinsip moral di lingkungan rumah. Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian anak.

Pendidikan berbasis Pancasila lebih dari sekedar kurikulum; merupakan sistem pembelajaran holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga guna menghasilkan generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berlandaskan cita-cita luhur negara. Melalui kerja sama, generasi muda Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Pemahaman menyeluruh terhadap cita-cita Pancasila sangat penting untuk mengatasi permasalahan globalisasi yang semakin kompleks (Kurniawan et al., 2023). Dampak positif globalisasi mencakup peningkatan akses terhadap pengetahuan dan kemajuan ekonomi, namun globalisasi juga mempunyai kelemahan, seperti penyebaran paham asing yang mungkin melemahkan identitas budaya lokal (Alfarizi et al., 2023). Agar generasi penerus dapat menolak pengaruh-pengaruh buruk tersebut namun tetap menghargai kedalaman budayanya sendiri, pendidikan berbasis Pancasila harus diperkuat.

Pada akhirnya, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka mendorong penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar dampaknya dapat dirasakan di seluruh lapisan

masyarakat, inisiatif-inisiatif ini harus berkelanjutan dan dilakukan secara rutin.

KESIMPULAN

Sebagai landasan moral dan etika kehidupan bernegara dan berbangsa, Pancasila mempunyai potensi yang sangat besar. Korupsi telah merasuki budaya dan sistem pemerintahan Indonesia, sehingga memerlukan strategi yang komprehensif bagi para konstituennya. Lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel diyakini dapat dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila—seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan—(Sari, 2024). Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai kerangka kebijakan pemerintah inklusif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang terus menjadi permasalahan di banyak tingkat masyarakat (Hendrawan, 2024).

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya keadilan sosial, cita-cita Pancasila harus digunakan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan keterlibatan masyarakat. Agar generasi muda memahami teorinya dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan berbasis Pancasila harus mendapat prioritas utama dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan (Widyastuti, 2024). Solusi berkelanjutan dapat dicapai ketika sektor publik, dunia usaha, dan masyarakat sipil bekerja sama. Misalnya, penerapan program pelatihan keterampilan secara kolaboratif dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kesulitan ekonomi.

Selain itu, pemerintah harus membantu lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pendanaan yang memadai dan pelatihan etika publik bagi anggota stafnya (Suharto, 2024). Hal ini penting agar organisasi dapat

menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan memungkinkan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan korupsi secara menyeluruh. Tindakan publik yang membantu masyarakat miskin juga harus menanggapi ketidakadilan sosial dengan serius (Kurniawan dkk., 2023). Untuk alokasi sumber daya yang lebih adil, pemerintah harus menerapkan perubahan struktural. Misalnya, dengan memberikan anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah lebih banyak akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Strategi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang beragam (Alfarizi et al., 2023). Untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan, kerjasama antara sektor publik dan korporasi serta kelompok non-pemerintah sangatlah penting. Salah satu cara untuk membantu masyarakat kecil memperoleh pendanaan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi adalah melalui program keuangan mikro. Oleh karena itu, mengamalkan cita-cita Pancasila bukan sekedar slogan; hal ini membutuhkan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.

Setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa terkendala oleh perilaku tidak etis atau ketidakadilan sosial berkat komitmen kita bersama. Melalui gotong royong, generasi muda Indonesia diyakini mampu berkembang menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki moral yang kuat dan berlandaskan cita-cita luhur Pancasila. Hal ini penting agar mereka dapat mempertahankan identitas budayanya sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Pemahaman menyeluruh terhadap cita-cita Pancasila sangat penting untuk mengatasi permasalahan globalisasi yang semakin kompleks (Kurniawan et al., 2023).

Dampak positif globalisasi mencakup peningkatan akses terhadap pengetahuan dan kemajuan ekonomi, namun globalisasi juga mempunyai kelemahan, seperti penyebaran paham asing yang mungkin melemahkan identitas budaya lokal (Alfarizi et al., 2023). Agar generasi penerus dapat menolak pengaruh-pengaruh buruk tersebut namun tetap menghargai kedalaman budayanya sendiri, pendidikan berbasis Pancasila harus diperkuat.

Pemerintah dan masyarakat pada akhirnya harus bekerja sama untuk mendorong penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan hal ini, kami tidak hanya menjaga keutuhan negara namun juga membantu generasi muda Indonesia mengembangkan karakter yang memungkinkan mereka menghadapi kesulitan dunia modern dengan lebih tangguh. Agar dampaknya dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, inisiatif-inisiatif ini harus berkelanjutan dan dilakukan secara rutin.

DAFTAR PUSAKA

Alfarizi, D. P. (2022). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai luhur. *Jurnal Pendidikan*.

Amanda, D. F., Liandy, D. F., Pamungkas, A., Kurniawan, A. T., Jilan, D. D., & Alfarizi, D. P. (2022). Peran pendidikan karakter dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. *Jurnal Pendidikan Karakter*.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik kemiskinan di Indonesia.

Forum Pemuda Anti Korupsi Indonesia (FPAKI). (2023). Pendidikan anti korupsi berbasis nilai-nilai luhur.

Hendrawan, B. (2024). Pendidikan karakter berbasis Pancasila: Solusi untuk membangun generasi emas. *Jurnal Pendidikan Karakter*.

Jilan, D. D. (2022). Persatuan dalam keberagaman. *Jurnal Sosial Budaya*.

Klitgaard, R. (2017). Corruption and the economy. Dalam *Corruption: A New Perspective* (hal. 12-30). New York: Routledge.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). (2023). Laporan tahunan tentang korupsi di Indonesia.

Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia. (2023). Strategi desa mandiri berbasis nilai-nilai luhur.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Program literasi digital.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Kurikulum Merdeka: Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan.

Kurniawan, A. T. (2022). Etika digital dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Komunikasi*.

Liandy, D. F., Pamungkas, A., Amanda, D. F., Kurniawan, A. T., Jilan, D. D., & Alfarizi, D. P. (2022). Peran Pancasila dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul*.

Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI). (2023). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan.

Nazir, M. (1985). Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pamungkas, A. (2022). Keadilan sosial dalam konteks kebijakan publik. *Jurnal Hukum*.

Sari, R. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*.

Suharto, A. (2024). Penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.

UNESCO. (2023). Laporan tentang pelestarian bahasa daerah di Indonesia.

Widyastuti, N. (2024). Peran pendidikan dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*.

Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Jurnal Edumaspul*, 5(1), 565-579. DOI: 10.33487/edumaspul.v5i1.1284.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2023). Keadilan sosial dalam kebijakan publik.